

Manajemen Isu Komunisme dalam Bingkai Nasakom di Era Soekarno (1959-1966)

Dian Wardiana Sjachro, Abie Besman

Prodi Jurnalistik, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran
Jl. Raya Bandung Sumedang KM 21, Jatinangor 45363

No. Telp/HP: 081222267022, 08122302641

d.wardiana@unpad.ac.id, abie.besman@unpad.ac.id

Abstract

This research focuses on the management issue of communism in the Nasakom framework through the policies and patterns of political communication of President Soekarno's government. This issue was used by Soekarno since the 1959 Presidential Decree. The solution implemented by Soekarno unwittingly opened a space for political communication in the middle way. Compromise management style is used to suppress conflicts that occur between interests. The method used in this study is the historical method. The results showed that the approach adopted by President Soekarno could not be separated from Communism. Even though it seemed to unite all the ideologies that were developing at that time, in fact there was a very sharp political competition between factions. This then led to the events of 30 September and the emergence of a new order. This research is part of a broader study to examine the management of communism issues in every political regime in Indonesia.

Keywords: *Nasakom, Issue Management, Communism, Literature Study*

Abstrak

Penelitian ini memiliki fokus pada manajemen isu komunisme dalam bingkai Nasakom melalui kebijakan dan pola komunikasi politik pemerintahan Presiden Soekarno. Isu ini digunakan dan berusaha dikendalikan oleh Soekarno sejak Dekrit Presiden 1959. Solusi yang diterapkan oleh Soekarno tanpa disadari membuka ruang komunikasi politik jalan tengah. Gaya manajemen kompromi digunakan untuk menekan konflik yang terjadi antar kepentingan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis. Hasil penelitian menunjukkan pendekatan yang diterapkan oleh Presiden Soekarno tak bisa terlepas begitu saja dari Komunisme. Meski terkesan menyatukan seluruh faham yang tengah berkembang saat itu, pada kenyataannya justru terjadi persaingan politik yang sangat tajam antar faksi. hal ini kemudian berujung pada Peristiwa 30 September dan munculnya orde baru. Penelitian ini adalah bagian dari penelitian yang lebih luas untuk meneliti manajemen isu komunisme pada setiap rezim politik di Indonesia.

Kata Kunci: Nasakom, Manajemen Isu, Komunisme, Studi Pustaka

PENDAHULUAN

Dalam setiap sistem politik, komunikasi politik merupakan aspek yang tak bisa dipisahkan dan mempunyai dinamika yang efektif untuk memecah kebuntuan yang terjadi antar dan antara kepentingan. Dinamika ini terjadi karena adanya perbedaan, kesamaan maupun kepentingan antarfaksi bahkan ideologi. Perebutan kekuasaan baik dalam konteks yang berada dalam sebuah sistem maupun di luar sistem kerap terjadi di Indonesia. Beberapa kejadian dalam rentang waktu lahirnya Republik Indonesia (1945) hingga pemilihan umum terakhir yang diselenggarakan (2019) menunjukkan beberapa peristiwa yang mengubah struktur komunikasi politik di Indonesia, baik disengaja, maupun tidak disengaja.

Jika memang disebut sebagai rivalitas politik, maka rivalitas ini bersifat cair dan dalam beberapa kesempatan menemukan jalannya bersama-sama. Namun dalam kesempatan lain saling menekan bahkan saling menghancurkan, tergantung kepentingan yang diinginkan. Paul Ricoeur (1986) menyebutkan fungsi ideologi negara adalah sebagai alat yang memiliki fungsi integrasi, yakni ideologi negara memiliki peran untuk memelihara identitas sosial dan membangun eksistensi sosial. Ideologi politik di Indonesia dalam beberapa segmen waktu juga menunjukkan mampu memelihara sebuah perbedaan, sekaligus di waktu yang sama juga turut andil untuk mempersatukan.

Rivalitas yang biasanya sering terjadi di Indonesia yaitu antara ideologi Pancasila, Nasionalis, Agama dan Komunisme (Nasakom) seperti yang telah dijelaskan oleh Soekarno (1963) dalam artikelnya yang berjudul Nasionalis, Islamis, dan Marxis.

Banyaknya perbedaan dan juga sulitnya mempersatukan Indonesia sebagian besar merupakan cerminan dari karakteristik negara Republik Indonesia, yang terdiri dari 17.504 pulau dan merupakan penggabungan dari berbagai macam suku, budaya, dan agama (Manuputty, Patittingi, & Ashri, 2015). Ciri

khas dari Indonesia adalah karakter persatuannya yang selama ini diklaim tidak dipersatukan oleh persamaan, melainkan oleh perbedaan, sehingga mengambil slogan resmi negara Republik Indonesia dari sebuah bahasa sanskerta “*Bhinneka Tunggal Ika tan hana dharma mangrwa*” (Santoso & Tantular, 1975) yang dapat diartikan sebagai “Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan dalam kebenaran”.

Dalam Undang-undang Dasar 1945, dijelaskan juga bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. Sejak Indonesia merdeka dan berdaulat sebagai sebuah negara pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara melalui UUD 1945 (yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945) telah menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut paham atau ajaran demokrasi, dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Dengan demikian berarti juga NKRI tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan (Marzuki, 2014).

Pola kepemimpinan demokrasi di Indonesia juga tidak bisa dipisahkan dari sistem kepartaian. Kebijakan seorang presiden akan sangat dipengaruhi oleh platform yang diusung oleh partai pendukungnya. Presiden Soekarno misalnya, meski pada awalnya merupakan salah seorang pendiri dari Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927 justru mengakhiri pemerintahannya di tahun 1965-1966 justru saat didukung oleh partai dengan dasar ideologis yang berlawanan dengan PNI, yaitu Partai Komunis Indonesia (PKI).

Perbedaan ideologi ini membuat potensi konflik selalu ada, apalagi jika melihat bagaimana polarisasi menjadi salah satu isu komunikasi politik secara nasional. Indonesia membutuhkan sebuah kebijakan dan juga manajemen untuk mengelola potensi konflik yang ada untuk menjadikannya sebuah kekuatan positif dalam mengelola negara. Manajemen konflik ini dimaksudkan untuk

mencapai kompromi yang efektif sekaligus menemukan jalan tengah (Wirawan, 2013).

Konsep jalan tengah ini secara tidak langsung merupakan salah satu visi yang terkandung dalam aspek politik dari ketahanan nasional Indonesia, yang meliputi semua aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, mengandung keuletan dan ketahanan yang memiliki kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Ketahanan nasional ini memastikan identitas, integritas, kelangsungan hidup bangsa dan negara, dan perjuangan untuk mencapai tujuan nasional.

Cetak biru pola komunikasi jalan tengah sebenarnya sudah diberikan oleh Soekarno melalui Nasionalis, Agamis dan Komunis (Winata, 2017). namun seiring dengan dimatikannya komunisme oleh orde baru, maka ruang untuk berkomunikasi hanya tinggal meninggalkan kaum Nasionalis dan Agamis saja, meski dalam berbagai kesempatan, hantu Komunisme kembali dibangun untuk mendapatkan keuntungan elektoral. Penelitian ini juga membuka kemungkinan adanya faksi tambahan lain dalam perjalanan penelitian, termasuk diantaranya adalah faksi yang tidak masuk dalam cetak biru Soekarno, seperti militer maupun *pressure group* (Hassan, 2007).

Landasan Konsep

Penelitian yang pernah membahas hal ini pernah dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya dilakukan oleh Harold Crouch (1971) yang membahas peran militer pascakudeta 30 September 1965 dalam mewujudkan politik orde baru. Crouch menyimpulkan terdapat dua elemen dasar untuk melihat bagaimana sikap pemerintah memperlakukan (komunikasi) politik sejak 1967. Pertama, ia melihat pemerintah secara sistematis mengizinkan warga sipil untuk memanfaatkan partai politik sebagai sarana alami untuk menyampaikan ekspresi dan juga penghubung (sekaligus mengawasi) warganya.

Kedua, pemerintah justru memanfaatkan saluran komunikasi politik untuk mencegah adanya kendaraan politik yang liar dan menjadi ancaman nyata terhadap otoritas pemerintah yang berkuasa. Contoh kasus yang dikemukakan oleh Crouch diantaranya adalah perlakuan pemerintah saat itu yang memegang para pimpinan Nahdlatul Ulama (NU) sehingga otomatis menggalang pengikut NU untuk mendukung orde baru. Otomatis pemerintah tidak perlu berbuat banyak, karena saluran komunikasi politik Islam saat itu sudah dikendalikan dan pengikut NU diarahkan untuk bersikap anti PKI yang dianggap berseberangan dengan kaum agamis.

Muhammad Hanif Hassan (2007) juga melakukan penelitian untuk memetakan posisi Islam dalam konstelasi politik di Malaysia. Hanif Hassan melakukan sebuah penelitian dengan pendekatan Joel Migdal dalam "Negara dalam Masyarakat". Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam mempengaruhi perubahan dan dominasi, negara bukanlah entitas kohesif. Pada kenyataannya, fungsi negara dalam suatu lingkungan di mana terdapat persaingan terus-menerus dari nilai dan kepentingan yang diajukan oleh berbagai kekuatan. Negara dan masyarakat sama-sama diidentifikasi sebagai kekuatan yang berinteraksi secara dialektik, masing-masing memengaruhi yang lain. Bahkan di dalam suatu negara, mungkin ada kekuatan yang berlawanan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Dalam situasi ini, negara bukanlah pembuat aturan yang dominan dan masyarakat juga bukan penerima pasif dari aturan-aturannya. Dalam menganalisis kekuatan di dalam negara dan masyarakat, pendekatan itu menyarankan bahwa seseorang harus memandangnya "Bagaimana penerapannya, di masa lalu, menjadi di masa kini dan mungkin di masa depan."

Dalam hal posisi khusus Islam di Malaysia, disarankan di sini bahwa pendekatan "Negara dalam Masyarakat" adalah alat ukur yang cocok untuk memberikan penelaahan yang lebih baik

terhadap masalah tersebut. Ini memberikan analisis yang mendalam dan melihat negara sebagai unit analisis. Dengan perspektif seperti itu, dapat dibuat analisis yang lebih komprehensif dan berlapis-lapis, yang lebih dekat dengan kenyataan. Gagal memahami hal ini akan menyebabkan kesulitan serius dalam menjembatani berbagai kekuatan di masyarakat untuk hidup berdampingan secara damai dan sipil di Malaysia.

Penelitian terhadap eksistensi partai politik dan akses dari pembubarannya juga sudah dilakukan oleh Riffandy Ritonga (2015). Khusus untuk orde lama, penelitian terkait Nasakom dan akses komunikasi politiknya juga pernah dituliskan oleh Lingga Winata (Winata, 2017). Winata mengambil kesimpulan bahwa Nasakom merupakan sebuah ideologi yang berusaha diterapkan pada masa demokrasi terpimpin, akan tetapi nasakom mengalami kegagalan. Melalui teori yang digunakan sebagai unit analisa dalam penelitian, dapat diketahui bahwa sebuah ideologi dikatakan berhasil jika memiliki tiga fungsi yang berjalan dengan baik. Fungsi yang pertama adalah fungsi distorsi, yang ketiga adalah fungsi legitimasi dan yang terakhir adalah fungsi integrasi.

Sementara itu, Hartuti Purnaweni (2004) menyimpulkan urgensi yang paling mendesak untuk membangun kestabilan demokrasi adalah membangun institusi-institusi demokratik sebagai prasyarat penting bagi peletakan sistem politik demokratis. Dalam konteks Pilkada langsung yang akan dimulai bulan Juni 2005, Indonesia akan menguji proses politik strategis menuju kehidupan politik demokratis. Namun di atas semua itu yang tak kalah penting adalah upaya Indonesia untuk membangun etika dan moralitas politik baru khususnya bagi para elit dan tokoh politik yang sebangun dengan tuntutan sistem politik demokratik.

Prasyarat penting yang diperlukan untuk memenuhi tuntutan itu adalah pentingnya dibangun kebudayaan dan kepribadian politik demokratik yang meliputi elemen-elemen: inisiatif rasional politik,

kesantunan politik, disposisi resiprositas toleransi, fleksibilitas dan *open mindedness*, komitmen kejujuran dan akhirnya keterbukaan. Didalam ungkapan berbeda akan tetapi memiliki substansi yang sama, upaya yang dimaksud hanya mungkin dimenangkan diatas keberhasilan sebuah bangsa membangun etika dan moralitas politik yang berkeadaban demokratik.

Penelitian lain yang membahas manajemen konflik dilakukan oleh Akeem Ayofe Akinwale (2011). Penelitian ini membahas pola konflik tradisional maupun modern yang terjadi di Nigeria. Termasuk bagaimana meminimalisir konflik yang terjadi. Berbagai cara untuk mencegah eskalasi kekerasan di Nigeria selalu berakhir dengan penyimpangan, meskipun telah dilembagakan. Fakta bahwa nilai-nilai manajemen konflik tradisional dan modern telah hidup berdampingan selama berabad-abad dan menjadi alat yang dikembangkan dalam menciptakan situasi yang ideal di Indonesia. Integrasi strategi manajemen konflik modern dan tradisional seharusnya memberikan solusi yang tepat untuk konflik di Nigeria. Ini akan menghasilkan pembangunan institusi yang akuntabilitas demokratis, inklusif, transparan, dan konstruktif di Nigeria. Pada dasarnya, infrastruktur komunikasi tradisional dan spiritualitas ontologis harus dibangun ke dalam sebuah kebijakan untuk melakukan manajemen konflik.

METODE PENELITIAN

Kajian mengenai komunikasi politik merupakan kajian yang sangat dominan jika berbicara mengenai konstelasi politik. Perkembangan komunikasi politik sebagai bidang kajian dapat dilihat jauh ke belakang sampai ke riset-riset awal dalam bidang komunikasi massa (Chaffee & Hochheimer dalam Gazali, 2004). Komunikasi politik oleh beberapa ilmuwan dianggap memiliki fungsi yang istimewa, karena komunikasi politik meletakkan basis untuk menganalisis permasalahan yang muncul dan

berkembang dalam keseluruhan proses dan perubahan suatu bangsa (Arrianie, 2010).

Komunikasi politik juga pada prosesnya selalu dekat dengan konflik dengan adanya perbedaan kepentingan. Parsons (2005) mendefinisikan pengambilan kebijakan berada di antara perumusan kebijakan dan implementasi, akan tetapi kedua hal tersebut saling terkait satu sama lain. Parsons mendefinisikan pembuatan kebijakan sebagai proses penentuan pilihan atau pemilihan opsi. Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa setiap kebijakan itu bertolak dari beberapa kemungkinan atau alternatif untuk dipilih, karena setiap alternatif membawa konsekuensi terutama konflik.

Historiografi merupakan proses penulisan sejarah yang sering dibantu beranekaragam metode penelitian sejarah. Dalam setiap bentuk penulisan sejarah ada perbedaannya, karena tulisan-tulisan mengenai suatu fakta sejarah pasti berbeda-beda dan sangat tergantung pada pengarang masing-masing. Seni dalam tulisan sejarah bersifat subjektif. Sejarah objektif merupakan fakta tersendiri, yaitu peristiwa sebagaimana terjadi dan tidak mungkin terjadi kembali. Akan tetapi, apabila sejarah sudah ada dalam tulisan pasti ada subyektivitas (Nikolic, 2008). Nikolic juga menyebutkan subyektivitas historiografi, pada umumnya, ada empat jenis, yaitu waktu, kelompok, pribadi, dan filsafat.

1. Subyektivitas waktu, yaitu kapan saja, sebuah teks atau sumber sejarah yang lain dibuat, disimpan, diterbitkan, digunakan dan diperoleh peneliti.
2. Subyektivitas kelompok, yaitu siapa yang menulis sebuah teks, sebab setiap kelompok mempunyai ciri khas dan alasan-alasan masing-masing.
3. Subyektivitas pribadi, yaitu hal seputar kepribadian, situasi dan posisi pengarang.
4. Subyektivitas filsafat yang dianut oleh pengarang.

Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis historis dari Bernheim (1903). Seperti yang dirangkum oleh Irwanto dan Sair (2014), Bernheim mendefinisikannya sebagai teknik-teknik penelitian yang terdiri atas empati, yaitu:

1. Heuristik (mencari dan menemukan sumber-sumber sejarah)
2. Kritik (sumber terpercaya) dan sumber kredibilitas jauh lebih lanjut sumber tersebut.
3. *Auffassung* (sintesis dari fakta yang diperoleh melalui sumber kritik atau disebut analisis sumber).
4. *Darstellung* (penyajian hasil dalam bentuk tulisan).

Ini menjelaskan jelas sejarah sebagai ilmu memiliki metode itu sendiri. Setelah membahas sejarah dilakukan secara ilmiah, maka sejarah dibahas dengan menggunakan metode sejarah. Cara kerja para sejarawan untuk menulis kisah masa lalu berdasarkan peninggalan-peninggalan peristiwa masa lalu atau sumber-sumber sejarah, terdiri atas:

1. Mencari jejak-jejak masa lampau
2. Meneliti jejak-jejak tersebut
3. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari jejak-jejak tersebut, berusaha membayangkan bagaimana menggambarkan masa lampau
4. Menyampaikan hasil-hasil diskusi tentang masa lampau sesuai dengan jejak-jejak tersebut atau tantangan ilmiah.

Penyebab konflik secara khusus dikarenakan adanya tindakan yang bertentangan dengan hati nurani, ketidakpastian mengenai kebutuhan yang harus dipenuhi, konflik perasaan, konflik kepribadian, dan konflik tugas diluar kemampuannya. Berikut beberapa sumber konflik dan penyebabnya (Fisher, 2000).

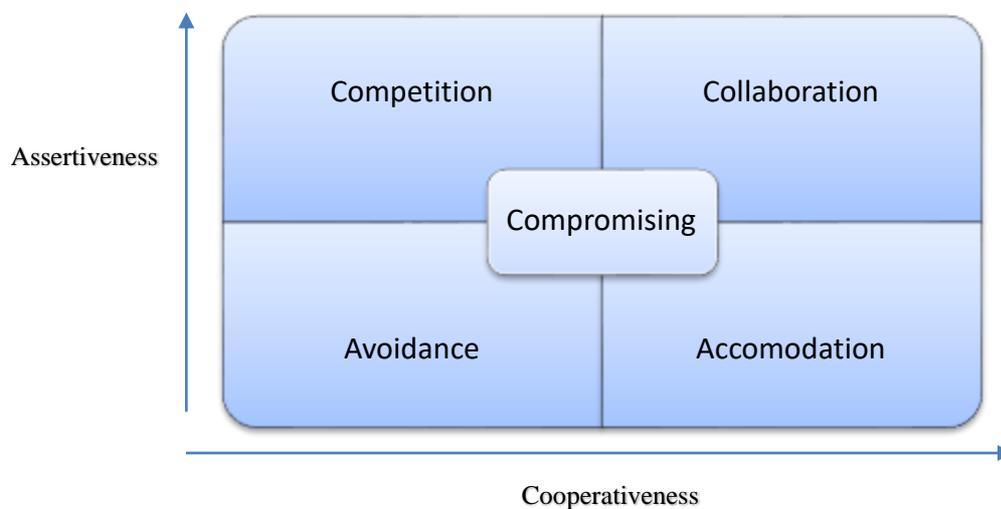
1. Konflik Interpersonal, Berupa perbedaan yang sangat kuat dalam

motif, nilai atau gaya dalam berurusan dengan orang lain dan tidak dapat diselesaikan.

2. Konflik Peran, Berupa perbedaan yang sangat nyata antara harapan, atau tanggung jawab dalam seorang individu dalam sebuah sistem sosial.
3. Konflik Dalam Kelompok, Terjadi di dalam kelompok atau tingkat pengambil keputusan dalam organisasi yang sama.
4. Konflik Antar Kelompok, Terjadi antar kelompok yang berbeda kepentingan, biasanya melibatkan kombinasi aspek ekonomi, prinsip, dan kekuasaan.
5. Konflik Internasional, terjadi antara negara di tingkat global. Konflik nilai

dan kekuasaan sering mendominasi. Saluran diplomasi untuk memberi dan menerima, atau mengancam dan melawan, menjadi sebuah keniscayaan.

Untuk menangani permasalahan ini dibutuhkan suatu cara untuk menekan konflik yang terjadi. Kerja sama adalah upaya orang untuk memuaskan orang lain jika menghadapi konflik. Di sisi lain, keasertifan adalah upaya orang untuk memuaskan diri sendiri jika menghadapi konflik. Berdasarkan kedua dimensi ini, Thomas dan Kilmann dalam Wirawan (2013) mengemukakan gaya manajemen konflik.



Teori Manajemen Konflik Thomas dan Kilmann

Gaya manajemen kompromi digunakan untuk menekan konflik yang terjadi antar faksi maupun kepentingan. Dalam menyajikan gaya manajemen kompromi yang dapat membantu pihak yang berselisih, dibutuhkan sebuah sistem yang mendukung dalam penyelesaian konflik yang sedang terjadi (Afif, 2014). Berikut adalah indikator mengenai tahapan keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan gaya manajemen konflik kompromi yang efektif (Wirawan, 2013).

1. Kemampuan negosiasi

2. Mendengarkan dengan baik yang dikemukakan oleh lawan politik
3. Mengevaluasi nilai
4. Memberikan konsesi (politik)
5. Menemukan jalan tengah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Soekarno sebagai tokoh utama dalam masa Demokrasi Terpimpin memberikan pengaruh besar terhadap keadaan politik Indonesia pada masa itu. Soekarno sellau

menjadikan politik sebagai panglima penggerak pemerintahannya. Soekarno yang memang saat itu tengah menyatakan perannya pada kolonialisme dan imperialisme mencoba menyerap dan menyatukan tiga ideologi besar pada masa kolonial Belanda tahun 1920-an yaitu Nasionalisme, Islam, dan Marxis, yang tidak lain adalah untuk melawan dan memberantas penjajahan pada masa itu.

Konsep pemikiran Soekarno tentang Nasakom pada masa demokrasi terpimpin bukanlah sebuah pemikiran politik yang muncul tiba-tiba, tapi merupakan sebuah konsep pemikiran yang telah ia rumuskan sejak tahun 1920-an. Pada masa mudanya Soekarno telah memiliki cita-cita besar menggabungkan tiga ideologi yang saat itu sangat berpengaruh dan memiliki akar yang kuat di kalangan kaum pergerakan.

Soekarno muda menuangkan gagasan ini dalam tulisan yang berjudul Islam, Nasionalisme dan Marxisme pada tahun 1926, tulisan itu dimuat di *Suluh Indonesia Muda* secara berseri. Dalam tulisannya Soekarno memandang perlunya ketiga ideologi itu untuk bersatu melawan imperialisme Belanda, karena untuk melawan kaum penjajah diperlukan suatu kekuatan efektif yang menghimpun semua unsur kekuatan politik yang ada di dalam masyarakat (Argenti & Sri Istiningdias, 2017).

Pidato Presiden kenegaraan Soekarno tanggal 17 Agustus 1961 berjudul “Resopim” atau “Revolusi, Sosialisme Indonesia, dan Pimpinan Nasional”. Dalam pidato ini, Soekarno menegaskan perlunya penggalangan semua kekuatan untuk memajukan negara sebagai syarat perencanaan pembangunan. Kekuatan yang dimaksud Bung Karno adalah tiga pilar utama yang selalu dikampanyekan saat itu yakni Nasionalis, Agama, dan Komunis atau Nasakom (Ismaun, 1981).

Menurut Soekarno, Nasakom adalah sebuah jalan tengah politik untuk menggabungkan faksi-faksi parlemen yang bertikai di bawah kendalinya. Soekarno harus melakukan apa yang menurutnya harus dilakukan saat itu, yaitu menyeimbangkan

republik di bawah kakinya sendiri. Indonesia berkembang menjadi negara otoriter yang antara lain membutuhkan kekuatan militer yang kuat (Besman et al., 2019).

Konsep jalan tengah ini sebenarnya sudah diperkenalkan sebagai Konsep Jalan Tengah TNI oleh Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Abdul Haris Nasution sebagai bentuk *equally political and role sharing* antara sipil dan militer pada tahun 1958 (Cahyono et al., 1999). Konsep “Jalan Tengah”, menurut Nasution memberikan cukup saluran pada tentara bukan lagi sebagai organisasi, tetapi sebagai perorangan-perorangan yang menjadi eksponen daripada organisasi untuk turut serta menentukan kebijaksanaan negara pada tingkat-tingkat yang tinggi” (Crouch, 2007). Menurut Susanto dan Supriatma (1995) pada 12 November 1958, di hadapan taruna-taruna Akademi Militer Nasional, Nasution menyebutkan bahwa dirinya menginginkan tentara dapat lebih aktif dalam melakukan politik, meski juga menghindari militerisme yang mempunyai akses terhadap kekuatan politik langsung.

Konsep Jalan Tengah TNI ini dilatarbelakangi oleh turunnya kepercayaan terhadap demokrasi parlementer karena pertikaian internal serta banyaknya pemberontakan daerah yang membuat hubungan daerah dengan pusat (Jakarta) memburuk. Hal ini membuat negara menerapkan Undang-Undang Darurat Militer atau *Staat van Oorlog en Beleg* (SOB) pada tahun 1957 (Bakrie, 2007). Penerapan SOB merupakan inisiatif Nasution yang disetujui Soekarno mengingat situasi negara digolongkan dalam keadaan darurat karena aksi-aksi separatis. Bagi Nasution, SOB dibutuhkan karena undang-undang mengenai keadaan darurat nasional yang disebutkan dalam UUD Sementara 1950 belum juga dibuat. Pengesahan SOB memberi kesempatan kepada tentara untuk bertindak lebih jauh lagi. Tentara semakin menjadi penentu serta mendominasi kondisi dalam negeri, bahkan

melampaui parlemen dan kekuatan-kekuatan lain (Haramain, 2004).

Dinamika politik yang terjadi, dukungan dari TNI dan pertarungan yang demikian kuatnya di dalam Konstituante membuat Soekarno menganggap perlunya ada satu ideologi untuk diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Formulasi pokok yang diketengahkan oleh Soekarno ialah isi pidato kenegaraannya pada tanggal 17 Agustus 1959, yang diberinya judul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, yang disebut sebagai Manifesto Politik atau Manipol (van der Kroef, 2015).

Isi Manipol ini diperhalus dan disempurnakan oleh Soekarno dan Ruslan Abdulgani sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Agung (1959-1962). Kolaborasi ini menjadikan Manipol sebagai basis politik nasional di bawah Demokrasi Terpimpin (Muhaimin, 1973). Isi Manipol ini kemudian disimpulkan menjadi lima prinsip, yaitu UUD 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia yang diberi akronim Usdek. Manipol-Usdek ini kemudian dikaitkan dengan dasar negara Pancasila, sehingga Pancasila-Manipol-Usdek menjadi rangkaian ideologi Demokrasi Terpimpin untuk melakukan kampanye dan propaganda kepada Rakyat Indonesia, dengan tenaga pendorongnya adalah TNI, sebagaimana dijelaskan oleh Daniel S. Lev (1963), bahwa tentara telah menjadi pendorong utama di belakang kampanye Manipol-Usdek, sesuatu yang tidak dimiliki oleh tentara di masa sebelum demokrasi terpimpin.

Di tahun yang sama, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) mengeluarkan ketetapan tentang Pedoman-Pedoman Pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan. Ini mengacu pidato Soekarno tanggal 17 Agustus 1961 serta 17 Agustus 1962 yang dijadikan sebagai pedoman pelaksanaan Manipol-Usdek Republik Indonesia.

Konsep demokrasi terpimpin hasil dari Dekrit Presiden ini menghasilkan pertarungan

sengit tentara TNI-AD melawan PKI yang sejak tahun 1959 telah menjalin aliansi politik dengan Presiden Soekarno. Kehidupan politik dan pemerintahan di Indonesia sejak 1959 sepenuhnya didominasi oleh tiga kekuatan politik utama: Presiden Soekarno, TNI dan PKI. Apa yang dimaksudkan oleh Soekarno sebagai jalan tengah untuk mengakhiri pertikaian justru berakhir dengan memberikan pengaruh yang lebih besar bagi PKI di Indonesia. Soekarno menjadi sangat bergantung terhadap dukungan massa maupun jaringan internasional PKI untuk menjalankan politik luar negerinya yang penuh konfrontasi (Dwikora, Trikora dan Nefo).

Saat diperkenalkan oleh Soekarno, Nasakom terbilang tidak lazim, karena menggabungkan beberapa kutub ideologi yang saat itu tengah berkembang. Soekarno mempunyai argumen untuk menepis prasangka itu. Soekarno mempunyai keyakinan jika Nasakom dapat dikontekstualisasikan dengan tepat, demokrasi dapat memperbaiki konstruksi ikatan untuk menjadi satu kesatuan (Hamid, 2012). Dalam sikap ekstrem terhadap demokrasi, baik yang menerima secara utuh maupun menolaknya, maka biasanya muncul jalan tengah yakni sikap kritis untuk belajar dari nilai-nilai demokrasi dengan segala kekurangan dan kelebihanannya (Suyanto, 1993).

Dalam perjalanannya, Nasakom tidak dapat diterima sepenuhnya, terutama oleh TNI Angkatan Darat (TNI-AD). Hanya TNI Angkatan Darat yang menjadi penghalang utama PKI untuk memperbesar pengaruhnya di Indonesia (Syukur, 2008). Pertentangan antara Presiden Soekarno, TNI-AD dan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam konteks politik Demokrasi Terpimpin menjadi penting dalam kajian kekuatan-kekuatan politik dalam sistem politik demokrasi terpimpin. Hal ini merupakan suatu elaborasi masalah kekuatan-kekuatan politik dalam sebuah sistem pemerintahan. Persoalan ini dibingkai ke dalam suatu konsep dasar, yaitu piramida kekuatan politik dalam sistem politik demokrasi terpimpin.

Piramida kekuatan-kekuatan politik dalam sistem politik demokrasi terpimpin tersebut diwarnai oleh pertentangan politik antara Presiden Soekarno, tentara dan partai politik. Pertentangan ketiga kekuatan politik tersebut disebabkan karena perbedaan orientasi ideologis. Perbedaan-perbedaan itu juga akan mencerminkan kedudukan ideologis kelompok itu masing-masing (Hamid, 2012). Pertentangan ini akhirnya berujung pada peristiwa Gerakan 30 September, yang menjadikan PKI sebagai tersangka utama sekaligus dalangnya. Akibatnya, Melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia (TAP MPRS) Nomor XXV/MPRS/1966, PKI dan juga paham komunisme dilarang hidup di Indonesia (Widiatmika, 2019). Otomatis ketetapan ini menjadikan konsep politik yang bertahan dalam desain Soekarno hanya tinggal konsep nasionalis dan juga agamis.

Keputusan untuk melarang komunisme hidup di Indonesia tidak secara langsung menghilangkan komunisme dari proses politik di Indonesia. Konflik ini bahkan terus terjadi sepanjang perjalanan demokrasi di Indonesia. Nama komunisme kerap disebut entah sebagai pengingat sejarah maupun sebagai stigma untuk menunjukkan keburukan dalam perpolitikan maupun kehidupan sosial di Indonesia Keputusan ini pada akhirnya menciptakan potensi konflik yang terus ada sejak tahun 1966 hingga hari ini. Gaya manajemen kompromi digunakan untuk menekan konflik yang terjadi antar faksi maupun kepentingan. Dalam menyajikan gaya manajemen kompromi yang dapat membantu pihak yang berselisih, dibutuhkan sebuah sistem jalan tengah yang mendukung dalam penyelesaian konflik yang sedang terjadi.

KESIMPULAN

Soekarno berusaha mewujudkan idealisme masa mudanya saat aktif dalam pergerakan kemerdekaan maupun saat menempuh pendidikan dalam konsep Nasakom. Soekarno memiliki kesimpulan

bahwa kemerdekaan dan revolusi Indonesia baru bisa dicapai bila sudah berhasil menggabungkan Nasionalisme, Islam dan Marxisme ke dalam konsep jalan tengah politik model baru yang diperkenalkan menjelang akhir era demokrasi liberal di Indonesia. Soekarno mempunyai pandangan bahwa kepentingan bangsa harus diletakkan lebih tinggi ketimbang kepentingan kepentingan golongan-golongan lainnya baik itu agama maupun paham-paham lainnya.

Nasakom hasil dari buah pemikiran Soekarno ini lahir disebabkan oleh kondisi sosial pergerakan di Indonesia, terutama saat Demokrasi Liberal dijalankan di Indonesia. Terlalu banyak kepentingan dan penggunaan jalan perjuangan yang berbeda, dengan tujuan yang berbeda pula. Hal ini selain menimbulkan konflik di tataran politik, juga menimbulkan konflik terbuka seperti pemberontakan maupun percobaan kudeta dengan kekerasan. Tidak adanya persatuan dalam visi Indonesia dibawa ke mana mendorong Soekarno untuk mengaplikasikan Nasakom dalam koridor Demokrasi Terpimpin.

Nasakom kemudian menjadi ambisi dan cita-cita politik Soekarno selama masa pergerakan pra-kemerdekaan hingga ke masa revolusi Pasca-Kemerdekaan yaitu sampai pada masa Demokrasi Terpimpin. Tidak mudah bagi Soekarno untuk mengaplikasikan pemikirannya tersebut. Tajamnya perbedaan di antara ketiga golongan ini dan pertentangan-pertentangan dari tokoh-tokoh lain membuat Soekarno tidak serta-merta mampu mengaplikasikan pemikirannya kedalam sistem politik Indonesia.

Pada masa Demokrasi Terpimpin itu sendiri, Nasakom kemudian menjelma menjadi sebuah alat Soekarno dalam mempertahankan posisinya yaitu dengan penggalangan massa dari beberapa golongan dari ketiga ideologi tersebut.

Meski Soekarno memiliki konsep lebih plural dalam konsep ideologi, namun karena kesamaan visi untuk menghancurkan Imperialisme/kapitalisme yang identik dengan

hegemoni barat membawa keduanya menjalin kedekatan, apalagi saat itu memang negara-negara pemimpin blok barat mulai menciptakan rasa tidak aman untuk pemerintahan Soekarno melalui pembentukan Negara Persemakmuran Malaysia dan juga perebutan Irian Barat. Meski kedekatan ini sendiri berupaya diimbangi oleh penggerak faham-faham lain, termasuk golongan Angkatan Darat yang sejak awal menolak beberapa ide dari PKI, diantaranya adalah pembentukan Angkatan ke-5. Kedekatan dan juga adu pengaruh antara kaum-kaum yang sebelumnya berada di bawah payung Nasakom inilah sebenarnya yang membawa Demokrasi Terpimpin berakhir dengan kegagalan. Setelah Angkatan Darat yang merupakan rival abadi dari Komunisme menggerakkan gerbongnya setelah 6 perwira tinggi dan 1 perwira pertamanya menjadi korban gerakan 30 September 196. Ini merupakan awal dari revolusi dan peralihan ke orde baru, yang kali ini tidak melibatkan Soekarno sebagai penggagasnya, melainkan melalui tangan Soeharto dan Nasution, sebagai representasi Angkatan Darat untuk menekan kekuatan komunisme. Hal ini berujung pada kegagalan faham Nasakom untuk ditegakkan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Afif, M. (2014). Model Manajemen Konflik Dalam Pengelolaan Kebun Binatang Surabaya. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 1(1), 1–7.
- Akinwale, A. (2011). Integrating the Traditional and the Modern Conflict Management Strategies in Nigeria. *African Journal on Conflict Resolution*, 10(3), 123–146. <https://doi.org/10.4314/ajcr.v10i3.63323>
- Argenti, G. dan I., & Sri Istiningdias, D. (2017). Pemikiran Politik Soekarno Tentang Demokrasi Terpimpin. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 14–27.
- Arriane, L. (2010). *Komunikasi Politik, Politisi dan Pencitraan di Pangung Politik*. Bandung: Widya Padjadjaran.
- Bakrie, C. R. (2007). *Pertahanan Negara dan Postur TNI Ideal*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Bernheim, E. (1903). *Lehrbuch der Historischen Methode Und der Geschichtsphilosophie Mit Nachweis der Wichtigsten Quellen Und Hilfsmittelzum Studium der Geschichte*. Duncker.
- Besman, A., Saktya, I., Dewi, I. R., Umboh, L., Ramadhani, N., Drivina, N., & Sullastri, Z. (2019). *Sang Patriot: Kisah Seorang Pahlawan Revolusi* (Second Edi; A. Besman, Ed.). Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Cahyono, H., Sulistyono, H., Bhakti, I. N., Tyas, H., Basyar, H., Nurhasim, M., ... Yanuarti, S. (1999). *Tentara Mendamba Mitra: Hasil Penelitian LIPI Tentang Pasang Surut Keterlibatan Militer Dalam Kehidupan Kepartaian di Indonesia*. Bandung: Mizan.
- Crouch, H. (1971). The Army, The Parties and Elections. *Indonesia*, 11, 177–191.
- Crouch, H. (2007). *The Army and Politics in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press.
- Fisher, R. (2000). Sources of Conflict and Methods of Conflict Resolution. In *International Peace and Conflict Resolution*. Retrieved from <https://pdfs.semanticscholar.org/c79d/9b7849528d3fa2170d33b6382f7da2b77a11.pdf%0Ahttp://www.ulstergaa.ie/wp-content/uploads/coaching/team-management-2012/unit-3/sources-of-conflict-and-methods-of-resolution.pdf> [accessed: June 5, 2012]
- Gazali, E. (2004). Interaksi Politik dan Media : Dari Komunikasi Politik ke Politik Komunikasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 8(1), 53–74.
- Hamid, H. (2012). *Demokrasi Ala Soekarno (Demokrasi Terpimpin)*. UIN Sultan Syarif Kasim.
- Haramain, A. M. (2004). *Gus Dur, Militer dan Politik*. Yogyakarta: LKIS.
- Hassan, M. H. (2007). Explaining Islam's Special Position and the Politic of Islam in Malaysia. *Muslim World*, 97(2), 287–316.
- Irwanto, D., & Sair, A. (2014). *Metodologi Historiografi Sejarah, Cara Cepat Menulis Sejarah*. Yogyakarta: EJA Publisher.

- Ismaun. (1981). *Tinjauan Pancasila, Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia (Dalam Rangkaian Cita-cita dan Sejarah Perjuangan Kemerdekaan)*. Bandung: Carya Remadja.
- Jaya Saputra, S., & Besman, A. (2017). Citra Joko Widodo Dalam Menghadang Isu Kebencian Dan Investasi Dengan Video Vlog. In S. Dida, P. Subekti, S. Lukman, R. Dewi, & F. A. A. Prastowo (Eds.), *Public Relations and Politics* (pp. 216–229). Retrieved from <http://procen.fikom.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2017/11/Buku-PR-Politik.pdf>
- Lev, D. S. (1963). The Political Role of the Army in Indonesia. *Pacific Affairs*, 36(4), 349. <https://doi.org/10.2307/2754682>
- Manuputty, A., Patittingi, F., & Ashri, M. (2015). The Existence Of Leading Islands Securing and The Border Areas Unitary State Of Indonesia (An Analysis In Law Perspective). *International Journal of Scientific and Technology Research*, 4(12), 89–92.
- Marzuki, S. (2014). *Politik Hukum: Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Muchtar, K. (2016). Komunikasi Politik dan Pembentukan Citra Partai. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 14(2), 136–147.
- Muhaimin, Y. A. (1973). *Perkembangan Militer Dalam Politik di Indonesia, 1945-1966*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Publishers.
- Muhammad Haniff Hassan. (2007). Explaining Islam's Special Position and the Politic of Islam in Malaysia. *Muslim World*, 97(2), 287–316. Retrieved from <https://anthrosource.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.1478-1913.2007.00174.x> [http://www.cpiasia.net/v3/images/policy_papers/Explaining Islam's Special Position and the Politic of Islam in Malaysia.pdf](http://www.cpiasia.net/v3/images/policy_papers/Explaining%20Islam's%20Special%20Position%20and%20the%20Politic%20of%20Islam%20in%20Malaysia.pdf)
- Nikolic, H. (2008). Analisis Stilistika Wacana Terjemahan Resmi Naskah Prasasti Plumpungan (Kajian Historis). *Kajian Linguistik Dan Sastra*, 20(2), 88–107.
- Parsons, W. (2005). *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktek Analisis Kebijakan*. Jakarta: Kencana.
- Pasolong, H. (2008). *Kepemimpinan Birokrasi*. Bandung: Alfabeta.
- Purnaweni, H. (2004). Demokrasi Indonesia: Dari Masa Ke Masa. *Jurnal Administrasi Publik*, 3(2).
- Ricoeur, P. (1986). *Lectures on Ideology and Utopia*. New York: Columbia University Press.
- Ritonga, R. (2016). Pembubaran Partai Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 10(2), 99–108.
- Santoso, S., & Tantular, M. (1975). *Sutasoma: A Study in Javanese Wajrayana*. New Delhi: International Academy of Indian Culture.
- Soekarno. (1963). *Dibawah Bendera Revolusi (Second Edi)*. Jakarta: Panitia Penerbit Dibawah Bendera Revolusi.
- Susanto, B., & Supriatma, M. T. (1995). *ABRI Siasat Kebudayaan*. Yogyakarta: Kanisius.
- Suyanto, I. (1993). *Soekarno: Pemikiran Politik Dan Kenyataan Praktek* (N. Syamsuddin, Ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syukur, A. (2008). Kehancuran Golongan Komunis di Indonesia. *Jurnal Sejarah Lontar*, 5(2), 1–8.
- van der Kroef, J. M. (2015). An Indonesian Ideological Lexicon. *Asian Survey*, 2(5), 24–30.
- Widiatmika, K. P. (2019). *Family, The Stories of Indonesian Family Conflicts and Political Messages in WhatsApp Groups*. University of Twente.
- Winata, L. (2017). Nasakom Sebagai Ideologi Negara Tahun 1959-1965. *Avatara, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 5(3), 728–737.
- Wirawan. (2013). *Kepemimpinan: Teori, Psikologi, Perilaku Organisasi, Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.